

**PENGARUH PAD DAN KOMPLEKSITAS TERHADAP KELEMAHAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,
D.I.Y, Dan Jawa Timur Tahun 2014)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

JUDA PRATAMA SUTOMO

B200130127

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

PERSETUJUAN

**PENGARUH PAD DAN KOMPLEKSITAS TERHADAP KELEMAHAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,
D.I.Y, Dan Jawa Timur Tahun 2014)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

JUDA PRATAMA SUTOMO

B 200 130 127

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh:

Dosen pembimbing


(Dr. Noer Sasongko, SE, M.Si, Ak, CA)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PAD DAN KOMPLEKSITAS TERHADAP KELEMAHAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,
D.I.Y, Dan Jawa Timur Tahun 2014)**

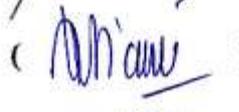
oleh:

JUDA PRATAMA SUTOMO

B 200 130 127

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada hari Rabu, 31 Januari 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Noer Sasongko, SE, M.Si, Ak, CA ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Erma Setiawati, MM, Ak. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2018

Penulis



Juda Pratama Sutomo

**PENGARUH PAD DAN KOMPLEKSITAS TERHADAP KELEMAHAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,
D.I.Y, Dan Jawa Timur Tahun 2014)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh PAD Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y, Dan Jawa Timur Tahun 2014). Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I.Y, dan Provinsi Jawa Timur tahun 2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 104 data. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kecamatan berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Sedangkan PAD, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Kata kunci: Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, PAD, Jumlah Kecamatan, Jumlah Penduduk.

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Pad and Complexity Against the Weakness of Local Government's Internal Control System (Empirical Study on Regency / Municipality of West Java, Central Java, D.I.Y and East Java Year 2014). The population of this research is district / city government in West Java Province, Central Java Province, D.I.Y Province and East Java Province in 2014. Sampling is done by using purposive sampling method with 104 sample data. Data analysis technique using classical assumption test that is normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. Hypothesis testing using multiple regression analysis. The results showed that the number of sub-districts had an effect on the weakness of the local government's internal control system. While PAD, and the number of residents have no effect on the weakness of internal control system of local government.

Keywords: *the weakness of the system of intern control, PAD, dictrict, population*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan layaknya perusahaan, merupakan sebuah bentuk tatanan organisasi kompleks yang mencakup segala bidang yang berhubungan dengan masyarakat. Berdasarkan pelaksanaan dan pembagian

wewenang, sistem pemerintahan dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, pemerintah baik pusat maupun daerah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku (Larassati, at al. 2013).

Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Yamin dan Sutaryo, 2015).

Pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat secara transparan sebagai bentuk hubungan keagenan. Pemerintah daerah berperan sebagai agent yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelayanan kepada publik dan rakyat sebagai principal. Dalam konteks hubungan keagenan, individu akan bertindak sesuai kepentingan masing-masing sehingga muncul *agency conflict*. Konflik antara principal dan agent disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam melakukan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Untuk meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi tersebut maka pemerintah daerah merancang suatu sistem pengendalian intern yang mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yamin dan Sutaryo, 2015).

Pengendalian intern memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan pengendalian intern yang baik agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai. Setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pengendalian intern (Fauza, 2015).

Terdapat beberapa kajian mengenai faktor-faktor penentu yang menyebabkan lemahnya sistem pengendalian intern. Diantaranya pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, kompleksitas daerah dan belanja modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Argumen ini didasarkan atas penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Martani dan Zaelani (2011) menemukan sumber pendapatan membuat masalah pengendalian internal meningkat. Sedangkan (Hartono, et al., 2014) tidak menemukan pengaruh PAD terhadap kelemahan pengendalian intern.

Kompleksitas juga menjadi penentu terjadinya kelemahan pengendalian intern. Gy dan My Vac (2005) dalam (Hartono, et al., 2014) menemukan bahwa perusahaan dengan kompleksitas transaksi memiliki kelemahan pengendalian intern tinggi. Yamin dan Sutaryo, (2015) dan Fauza (2015) menemukan pengaruh positif kompleksitas daerah (jumlah SKPD) terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Sedangkan Sedangkan Martani dan Zaelani (2011) tidak menemukan adanya pengaruh jumlah kecamatan terhadap kelemahan pengendalian intern. Pada penelitian ini kompleksitas pemerintah daerah akan diproksikan dengan jumlah

kecamatan dan jumlah penduduk. Penggunaan jumlah kecamatan sebagai proksi dari kompleksitas pemerintah daerah atas dasar penelitian sebelumnya diantaranya (Hartono, et al., 2014), Saputro dan Mahmud (2015), Rachmawati dan Handayani (2016).

Jumlah penduduk juga menjadi penentu terjadinya kelemahan pengendalian intern. Yamin dan Sutaryo, (2015) dan Iqbal (2017) menemukan pengaruh positif jumlah penduduk terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Sedangkan Martani dan Zaelani (2011) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif jumlah penduduk terhadap kelemahan pengendalian intern.

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian intern. Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh PAD, dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH PAD, DAN KOMPLEKSITAS, TERHADAP KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y, dan Jawa Timur, dan Tahun 2014)”**.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian meliputi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I.Y, dan Provinsi Jawa Timur tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pengambilan sampel adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I.Y, dan Provinsi Jawa Timur tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Provinsi D.I.Y, dan Provinsi Jawa Timur tahun

2014 yang menyusun LKPD dan telah diaudit oleh BPK, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki data yang terkait tentang variabel-variabel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression Method*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas ialah dengan melakukan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,066 dengan probabilitas (*p-value*) sebesar 0,200 Nilai tersebut berada di atas 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada model regresi persamaan terdistribusi normal.

3.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, (2) jika nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa masing-masing nilai *VIF* kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 untuk setiap variabel. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011:139). Uji heteroskedastisitas dilakukan

dengan uji *Glejser*. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

3.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2011). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai *durbin Watson* (DW) sebesar 1,818, nilai tersebut berada diantara d_U (1,7355) dan d_L (1,6108), yang artinya model persamaan regresi tidak terdapat masalah Autokorelasi dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Pengujian Hipotesis

3.2.1 Pengaruh PAD Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Dari hasil tabel IV.7 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel PAD sebesar $0,475 < 1,984$ dan nilai signifikan sebesar $0,636 > 0,05$, sehingga **H₁ ditolak**, yang artinya PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Hasil ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan PAD tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah yang memiliki PAD yang tinggi belum menjamin sistem pengendalian internnya juga akan lebih baik daripada Pemerintah Daerah yang memiliki PAD lebih rendah.

Kristanto (2009) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah dikarenakan sejak semakin maraknya pengungkapan pejabat daerah dan anggota DPRD ke pengadilan akibat kasus korupsi terhadap

dana Anggaran Pendapatan dan APBD, membuat PAD sebagai salah satu obyek korupsi mendapat pengawasan khusus dalam peruntukannya dengan tujuan agar pemerintah daerah efektif melakukan kebijakan demi kepentingan rakyat banyak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fauza (2015), Hartono, et al. (2014), Saputro dan Mahmud (2015), dan Rachmawati dan Handayani dan Handayani (2016) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aini (2017), Martani dan Zaelani (2011), dan Iqbal (2017) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern.

3.2.2 Pengaruh Jumlah Kecamatan Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Dari hasil tabel IV.7 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel jumlah kecamatan sebesar $-2,645 > -1,984$ dan nilai signifikan sebesar $0,010 < 0,05$, sehingga **H_2 diterima**, artinya jumlah kecamatan berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, semakin banyak jumlah kecamatan yang ada disuatu daerah maka pengendalian intern yang ada semakin kompleks, dikarenakan segmen-segmen yang ada disetiap kecamatan memerlukan pengendalian secara menyeluruh untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang serta kecurangan yang lain. Hasil ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki jumlah kompleksitas lebih tinggi memiliki jumlah kasus kelemahan pengendalian intern. Jumlah kecamatan yang banyak pada setiap daerah akan sulit dalam mengimplementasikan pengendalian intern.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hartono, et al. (2014) yang menyatakan bahwa jumlah kecamatan berpengaruh

terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rachmawati dan Handayani (2016), Martani dan Zaelani (2011), dan Saputro dan Mahmud (2015) yang menyatakan bahwa jumlah kecamatan tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern.

3.2.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Dari hasil tabel IV.8 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel jumlah penduduk sebesar $1,788 < 1,984$ dan nilai signifikan sebesar $0,077 > 0,05$, sehingga **H₃ ditolak**, yang artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki ukuran besar akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk melakukan pengendalian intern dengan harapan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Perusahaan atau organisasi yang mempunyai ukuran besar dilihat dari segi sumber daya dan finansial cenderung mampu untuk melakukan pengendalian intern dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saputro dan Mahmud (2015) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kelemahan system pengendalian intern. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Iqbal (2017), Yamin dan Sutaryo (2015), dan Martani dan Zaelani (2011), yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern.

3.3 Uji Fit Model (Uji F)

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai F_{hitung} (3,355) lebih besar dari F_{tabel} (2,70) dengan *p-value* (0,022) < 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, jumlah kecamatan dan jumlah

penduduk secara simultan berpengaruh terhadap variabel kelemahan sistem pengendalian intern. Selain itu dengan melihat nilai signifikan kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model penelitian fit (*goodness of fit*).

3.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Serta hasil perhitungan untuk nilai *adjusted* R^2 dengan bantuan program spss, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *adjusted* R^2 sebesar 0,067. Hal ini berarti bahwa 6,7% variasi variabel kelemahan sistem pengendalian intern dijelaskan oleh PAD, jumlah kecamatan dan jumlah penduduk, sementara sisanya 93,3% diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat diambil simpulan sebagai berikut: (1) PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $-0,475 < 1,984$ dan nilai signifikan sebesar $0,636 > 0,05$. (2) Jumlah Kecamatan berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $-2,645 > -1,984$ dan nilai signifikan sebesar $0,010 < 0,05$. (3) Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $1,788 < 1,984$ dan nilai signifikan sebesar $0,077 > 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini mempunyai saran sebagai berikut : (1) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tidak hanya menggunakan data sekunder, tetapi juga wawancara dengan pihak pemerintah daerahnya agar informasi yang diperoleh lebih jelas dan lengkap terutama seputar sistem pengendalian internal yang diterapkannya. (2) Menambahkan cakupan sampel dan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil yang diperoleh akan lebih menjelaskan gambaran

kondisi yang sesungguhnya. (3) Menambahkan variabel lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan pengendalian intern pemerintah daerah, seperti jumlah aset, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pertumbuhan, dan tingkat pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat (DAU). (4) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mencari informasi atau ketentuan yang menjelaskan tentang bagaimana temuan kasus sistem pengendalian intern itu dapat dinilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Gita Putri dan Ikhsan Budi Riharjo. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi* : volume 5, nomor 4, ISSN: 2460-0585
- Aini, Fitriatul. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kompleksitas Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode 2011-2012). *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1 (Februari).
- Fauza, Nailatul. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Se Sumatera). *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. ISBN 979.740.015.1.
- Hartono, Amir Mahmud, dan Nanik S.U. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram*.
- Iqbal, Muhammad. 2017. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Riau Dan Sumatera Barat). *JOM Fekon* Vol. 4 No. 1 (Februari).
- Julitawati, Ebit, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana*. Universitas Syiah Kuala.

- Kristanto. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi Ukrida*, Volume 9, No.1, Januari 2009- ISSN: 1411-691X.
- Larassati, R, R. Anggraini dan E. Gerendrawaty. 2013. “Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Periode 2009-2010”. *Simposium Nasional Akuntansi XXVI*. 25-28 September 2013. Manado.
- Martani, dan Zaelani. 2011. Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas terhadap pengendalian intern pemerintah daerah studi kasus di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*.
- Rachmawati, Dian Eka dan Nur Handayani. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi : volume 5, nomor 4*, ISSN: 2460-0585.
- Restuningdiah, Nurika dan Nur Indriantoro. 2000. Pengaruh Partisipasi terhadap Kepuasan Pemakai dalam pengembangan Sistem Informasi dengan Kompleksitas Tugas, Kompleksitas Sistem, dan Pengaruh Pemakai sebagai Moderating Variable. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 3, No. 2: 119- 133.
- Saputro, Adi Eko dan Amir Mahmud. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*.
- Sularno. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*.
- Yamin, Ridha dan Sutaryo. 2015. Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*.